

Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Evaluation of the Impacts of Community Empowerment Program through Distribution of Business Credit for People in Sumber Lesung Village, District of Ledokombo, Jember Regency

Chandra Mukti, Sutomo, Suji,
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 *E-mail*: Chan_mukti13@yahoo.co.id

Abstract

This research aimed to describe the impacts of community empowerment program through the distribution of Kredit Usaha Rakyat or KUR (business credit for people) in Sumber Lesung, District of Ledokombo, Jember Regency. The research used descriptive research design with qualitative approach. Samples were collected using purposive sampling. Data were collected by observation, interview, documentation, and literature study. Technique of data validity used triangulation with the sources. Data analysis in the research used interactive model. The results showed that the empowerment by the Government through PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk of Ledokombo Unit was carried out by providing access and economic empowerment for actors of Micro, Small and Medium Enterprises. Furthermore, KUR was distributed to Micro, Small and Medium Enterprises that had already exist in Sumber Lesung to address issues faced by Micro, Small and Medium Enterprises and improve their productivity. The profile of distribution of KUR in Sumber Lesung, direct interviews were conducted to the Micro, Small and Medium Enterprises related to the requirements and procedures of applying for credit. Furthermore, the KUR distribution in Sumber Lesung showed positive impacts and negative impacts. The sales volume of the Micro, Small and Medium Enterprises after getting KUR showed an effective sales volume, so that it can be said that the use of KUR funds was effectively.

Keywords: evaluation, impact, community empowerment, distribution of business credit for people.

PENDAHULUAN

Salah satu isu sentral permasalahan di Indonesia sampai saat ini adalah masalah kemiskinan. Hal tersebut karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya memerlukan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah kesenjangan baik antar golongan penduduk maupun pembangunan antar wilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli. Oleh karenanya diperlukan cara yang sinergis dan sistematis dalam penanggulangan kemiskinan untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi muda dan menjamin kelangsungan pembangunan dimasa mendatang.

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan beserta segala penyebabnya. Upaya yang dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap pembangunan. Dalam konteks inilah, pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin menjadi sangat penting dan strategis mengingat jumlahnya yang relatif besar, sehingga berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2009:7) adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta permodalan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang berdasarkan Instruksi Presiden nomor 06 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah skema kredit/ pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). Tujuan pelaksanaan program KUR ini adalah memberikan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaan program KUR terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu pertama adalah Pemerintah, Kedua adalah lembaga penjamin yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga adalah perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah satu-satu Bank yang memiliki Unit hingga ke Kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Jember, maka dari itu untuk memperluas dan memberikan kemudahan bagi umkm yang mengajukan KUR, pada tahun 2011 BRI membuka unit BRI di Kecamatan Ledokombo. Kemudian sejak dibukannya unit BRI di Ledokombo, umkm yang sebelumnya mengajukan KUR di Unit BRI Kalisat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ke BRI Unit Kalisat. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak tahun 2011 umkm yang mengajukan KUR di

BRI Unit Ledokombo mengalami peningkatan. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kecamatan Ledokombo

No.	Tahun	Jumlah
1	2011	101 umkm
2	2012	249 umkm
3	2013	449 umkm
4	2014	461 umkm

Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo

Selanjutnya peneliti lebih memfokuskan penelitian di Desa Sumber Lesung, di karenakan jumlah umkm yang mengajukan KUR terbanyak di Kecamatan Ledokombo berada di Desa Sumber Lesung seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Banyaknya UMKM Menurut Desa di Kecamatan Ledokombo

No	Desa	2011	2012	2013	2014
1	Suren	12	29	52	54
2	Sumber Salak	9	22	40	41
3	Sumber Bulus	11	27	49	50
4	Sumber Lesung	15	37	67	69
5	Lembengan	14	35	63	65
6	Sumber Anget	7	17	31	32
7	Ledokombo	8	20	36	36
8	Slateng	11	27	49	51
9	Sukogidri	6	16	28	29
10	Karang Paiton	8	19	34	34
	jumlah	101	249	449	461

Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo.

Selanjutnya, KUR selama keberlangsungannya telah menunjukkan peningkatan penyalurannya. Sebagaimana dilansir dari penjelasan presiden Yudhoyono dalam media

on line skalanews.com (diakses tanggal 4 september 2014), Total penyaluran KUR kepada UMKMK sampai saat ini sudah mencapai Rp82 triliun, dan yang mengalami kemacetan hanya sekitar 4%. Ia juga mengatakan bahwa KUR sebagai program pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kecil sejak 2007 sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Mengacu pada penjelasan tersebut, program KUR hingga saat ini sudah berjalan selama 6 tahun. Sehingga, telah dapat dinilai dampak dari KUR itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember”** dimana program KUR ini merupakan salah satu program yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali guna memaksimalkan program yang di tujukan untuk penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?”**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah **“Untuk Mengetahui Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran**

Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo.”

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan

Suhartono (2010:1) sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Todaro (dalam Suhartono, 2010:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait:

1. meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;
2. mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan;
3. memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan, dimana mereka dituntut untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Menurut Simanjuntak (1998:1), sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mengembangkan masyarakat agar terampil dan berkualitas maka pengembangan secara makro yang lebih tepat, karena diharapkan hasilnya masyarakat mampu mengolah atau mengelola SDA, menguasai teknologi, megkreasikan produk, mampu memasarkan produk, melatih orang lain, membuka usaha sendiri sehingga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat lain. Untuk pengembangan sumber

daya manusia di Desa Sumber lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2005:2) kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

2.4.1 Jenis-Jenis Kebijakan

Jenis-jenis kebijakan dapat dibagi dalam beberapa kategori, Anderson (dalam Subarsono, 2005:19-21) mengemukakan kategori-kategori berikut.

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural.
2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif.
3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik dan barang privat.

Dalam konteks penelitian ini, program Kredit Usaha Rakyat termasuk ke dalam jenis kebijakan Substantif dan kebijakan prosedural. Dimana salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di dalamnya

termuat bagaimana kriteria orang tersebut dan bagaimana prosedur memperolehnya.

2.4.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Winarno (2007:32) proses kebijakan publik dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan berikut:

1. Penyusunan agenda
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Dalam Wirawan (2011:17) dijelaskan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien, dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya. Sehingga evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

2.5.1 Tipe Evaluasi Kebijakan

Anderson (dalam Winarno, 2007:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yakni.

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
3. Evaluasi kebijakan sistematis.

Berdasarkan tipe evaluasi di atas, penulis menggunakan tipe evaluasi ketiga yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis. Karena tipe evaluasi ini melihat secara obyektif program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Tipe evaluasi ini diarahkan untuk melihat dampak atau hasil dari suatu kebijakan itu untuk menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Hasil dari pengembangan sumber daya manusia adalah masyarakat yang berdaya. Menurut Mardikanto dan Purwoko (2012:61), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Selanjutnya, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Adapun kompetensi atau kemampuan yang diwujudkan dalam pengetahuan dan keterampilan serta ditunjang oleh sikapnya yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat

diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut (Anwas, 2013:62).

1. Kompetensi pemahaman sasaran
2. Kompetensi menumbuhkan kesadaran
3. Kompetensi komunikasi inovasi
4. Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan
5. Kompetensi pengelolaan pembelajaran
6. Kompetensi pengelolaan pelatihan
7. Kompetensi pengembangan kewirausahaan
8. Kompetensi pemandu sistem jaringan
9. Kompetensi menumbuhkembangkan kelembagaan
10. Kompetensi pendampingan
11. Kompetensi melek TIK
12. Kompetensi mencari sponsorship
13. Kompetensi mempengaruhi media masa

Dilihat dari 13 dimensi diatas peneliti memilih Kompetensi pengelolaan pelatihan, karena pelatihan merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan masyarakat menuju peningkatan kualitas hidupnya dan juga semakin beragamnya masyarakat, maka akan memberikan banyak pilihan jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana program pelatihan.

Program Kredit Usaha Rakyat

Penjelasan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai Program Kredit Usaha Rakyat:

1. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khususdiperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK)

di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhanpersyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilaidibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan olehPemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PTJamkrindo dan PT Askrindo.

2. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

a. Mempercepat pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) b. Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKMK dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan.

c. Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

3. Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya.Harapannya agar kelompok

masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

Evaluasi

Apabila suatu program telah dilaksanakan maka penting untuk dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak yang dihasilkan setelah program itu terlaksana. Malcolm, Provus, pencetus *Discrepancy Evaluation*, mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar yang mengetahui apakah ada selisih (dalam Tayibnapi, 2000:3). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyatakan bahwa evaluasi adalah “rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (SOP) dari program yang akan di evaluasi.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan evaluasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu sebagai berikut.

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi Dampak Program

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Kalimat “usaha untuk menentukan” digunakan dalam pembahasan ini karena evaluasi dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang

sebenarnya dari kebijakan, suatu tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit (Anderson dalam Winarno 2007:231). Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan tertentu), bagaimana melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di samping itu, dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang telah terjadi di kehidupan nyata, seperti misalnya pengurangan angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-keputusan ekonomi swasta. Dalam evaluasi dampak program juga harus dicermati bahwa dampak yang terjadi betul-betul sebagai akibat dari program yang sedang dievaluasi, bukan dampak dari program lain (Subarsono 2005:129).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis akan mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada UMKM. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian, dimana tempat penelitian ini akan

dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember karena pada tahun 2011 BRI membuka unit BRI di Kecamatan Ledokombo. Selanjutnya pada tahun 2011 debitur KUR terbanyak ada di Desa Sumber Lesung. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2009:174). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi: Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992). Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2005:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pemberdayaan Oleh Pemerintah Melalui PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo.

Program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah melalui PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo dilakukan dengan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Penyaluran KUR Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk merupakan suatu wadah untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran KUR. Dalam menyukseskan program Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Salah satunya melalui pemberdayaan UMKM yang bekerja sama dengan melibatkan enam Bank pelaksana, salah satunya yaitu Bank PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk. Dimana dalam program tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu melaksanakan penyaluran KUR sehingga dapat mengembangkan

kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Penyaluran dilakukan kepada UMKM yang telah ada di Desa Sumber Lesung, penyaluran dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi UMKM dan meningkatkan produktivitas UMKM. Adapun beberapa UMKM yang mendapatkan penyaluran dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo adalah.

No.	Nama Para UMKM	Bidang Usaha	Tahun Penyaluran	Jumlah Kredit	Jangka Waktu
1	Bpk. Hasan	Toko bangunan	2011	5.000.000	1 tahun
2	Bpk. Yoyok	Pedagang sembako	2011	20.000.000	2 tahun
3	Ibu Tutik	Dagang Konfeksi	2012	10.000.000	2 tahun
4	Bpk. Heri	Warung Bakso	2012	5.000.000	1 tahun
5	Bpk. Sodik	Pertanian	2013	10.000.000	2 tahun
6	Ibu Kiblatti	Kerajinan kain perca	2014	5.000.000	1 tahun

Sumber: diolah daridata primer BRI Unit Ledokombo

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Bank Pelaksana. Besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKM. Untuk Usaha Mikro plafon KUR mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000. Untuk KUR Ritel (Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi) plafon KUR mulai Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.

Dengan adanya berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo diharapkan para UMKM dapat memilih produk sesuai kemampuan dan keinginan. Besar kecilnya UMKM juga menentukan besar kecilnya jumlah kredit yang

dikurcurkan oleh pihak Bank. Dengan adanya prosedur yang ditetapkan maka dapat diseleksi debitur yang berhak mendapatkan KUR berupa modal usaha.

Para UMKM merasa terbantu dengan proses yang mudah dan hasil maksimal. Hanya dengan foto dokumentasi hasil usaha dari UMKM. Pemilihan kredit, khususnya untuk KUR yang disarankan oleh pihak Bank mempermudah UMKM untuk menikmati fasilitas yang telah diberikan Pemerintah yang ada dalam produk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo sebagai penyalur KUR.

Gambaran Penyaluran KUR pada UMKM di Desa Sumber Lesung

Langkah-langkah dalam prosedur Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur administrasi pendaftaran permohonan kredit.
2. Administrasi Pemeriksaan Calon Nasabah Dan Usulan Putusan Kredit.
3. Administrasi Putusan Kredit.
4. Administrasi Realisasi Kredit.
5. Administrasi Pembayaran Angsuran kredit

Peneliti melakukan wawancara kepada UMKM secara langsung terkait tentang persyaratan dan prosedur pengajuan kredit. Kelima nasabah Kredit Usaha Rakyat cenderung menjawab sama, Kredit Usaha Rakyat ini persyaratannya relatif mudah prosesnya cepat, dan pencairan dana KUR hanya memerlukan waktu selama dua hari, sehingga diharapkan para UMKM

tertarik dengan adanya kredit ini. Dengan adanya prosedur yang mudah dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu pada pihak Bank dan pihak umkm.

Dampak Penyaluran KUR pada UMKM di Desa Sumber Lesung

Sebagaimana yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini, bahwa menurut Subarsono (2005:121), evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

1. Dampak Positif

Beberapa hal yang telah dijabarkan diatas maka pihak bank selalu melakukan pengawasan kepada UMKM secara berkala dapat dilakukan tiap bulan atau 3 bulan sekali bahkan 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi UMKM. Selain itu juga melakukan sharing mengenai kendala-kendala yang ada. Bank juga melihat tingkat efisiensi penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat dengan laporan keuangan, laporan produksi dan asset yang dimiliki oleh UMKM. Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan hanya berupa kunjungan ditempat, kadang-kadang mereka melakukan pembayaran melalui kantor BRI Unit Ledokombo.

Adanya Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh Pemerintah kepada UMKM lewat program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi diharapkan dapat memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam

skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, kemudian meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha dari UMKM. Selain itu, dari adanya KUR bagi UMKM adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut terbukti dengan semakin bertambahnya kesadaran nasabah untuk mengembangkan usahanya. Nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penggunaannya sangat bervariasi namun tetap pada fungsi masing-masing sebagai modal kerja dan investasi. Selanjutnya dampak positif juga masih dirasakan dengan oleh debitur sebagai tambahan modal. dampak positif adanya KUR dengan bertambahnya bidang usahanya secara otomatis pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak orang lain membuka lapangan pekerjaan dan membantu mengerjakannya. Selanjutnya para debitur juga harus mencari cara untuk mengembalikan pinjaman KUR tersebut.

2. Dampak Negatif

Kredit Usaha Rakyat ini juga mempunyai dampak negatif bagi para UMKM, yakni tidak memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar melainkan di gunakan untuk keperluan yang lain. Sehingga penyalah gunaan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan itu semula untuk produksi, kenyataannya dalam perjalanan itu dipakai untuk

konsumsi bukan untuk investasi, berarti tidak sesuai dengan tujuan program KUR. Adapun kendala-kendala yang sering terjadi adalah banyak nasabah atau UMKM yang salah mengartikan bahwa Kredit Usaha Rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal haruslah UMKM yang memiliki usaha minimal 6 bulan sampai 1 tahun berjalan. Harapan pihak bank, bank dapat membantu permodalan UMKM yang telah memiliki usaha bukan untuk membuat atau membangun usaha baru. Oleh karena itu, diharapkan dana yang telah dikucurkan itu bias tepat guna (efektif). Sebenarnya bukan untuk hal yang investasi yaitu bukan memberikan keuntungan untuk usahanya, tetapi untuk menutup pinjaman. Jadi Kredit Usaha Rakyat masih menunjukkan masih ada gejala belum mampu mengangkat ketergantungan sama pihak lain atau rentenir.

Volume Penjualan Para UMKM Setelah Mendapatkan KUR

Dapat diketahui Usaha Toko Bangunan yang dikelola oleh Bapak Hasan Basri selama kurang lebih kurun waktu 10 tahun mencapai perkembangan volume penjualan yang pesat berawal dari laba perhari Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000 setelah mendapatkan Kredit Usaha rakyat.

Toko Sembako milik Bapak yoyok, penjualan took sembako ini juga pesat terlihat dari volume penjualan yang meningkat. Jika dilihat volume penjualan took sembako ini paling banyak, karena pada hakekatnya penjualan ini dibutuhkan oleh masyarakat. Orang pasti membutuhkan

kebutuhan sembako tiap hari. Untuk prospek jangka panjang took ini cukup menjanjikan. Oleh karena itu Bapak Yoyok mendapatkan kepercayaan dari bank, untuk melakukan kredit. semula kredit yang dikucurkan Rp. 5.000.000, untuk kredit yang selanjutnya Bapak Yoyok meminjam KUR sebesar Rp. 20.000.000. Bapak Yoyok juga tidak pernah terlambat membayar angsuran, sangat terlihat bahwa sirkulasi keuangan Bapak Yoyok berjalan lancar.

Dagang konfeksi (pakaian) yang dikelola oleh ibu Tutik Farida, walaupun tempatnya jika dilihat dari luar tidak terlalu besar, namun prospek penjualannya sangat pesat. Pemasaran yang dilakukan oleh ibu Tutik Farida ini selain membuka took pakaian di sebelah rumahnya. Ibu Tutik Farida juga mempunyai reseller tetap yang menjualkan produknya melalui kredit. jadi, volume penjualannya juga meningkat pesat. Kendala yang dihadapi adalah trend mode yang sangat cepat berubah, sehingga mengharuskan penjual update. Untuk stok lama hanya dijual lebih murah dengan memberikan diskon. Karena harga baju yang beraneka ragam estimasi harga baju sekitar Rp. 40.000 sampai dengan Rp. 50.000 dan laba perbaju bias Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 13.000. apabila harga kredit bias mendapatkan laba yang lebih besar, namun juga perputaran keuangannya lambat.

Bapak Heri prayetno pemilik warung bakso, jika dilihat volume penjual dari laba bapak heri prayetno tidak meningkat hal tersebut disebabkan penggunaan dana tambahan tersebut

digunakan untuk membenahi warungnya. Sehingga laba perbulannya sama dari sebelum dan sesudah mendapatkan kredit.

Berdasarkan ketiga UMKM tersebut menunjukkan adanya volume penjualan meningkat secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat efektif. Sebab, bermula dari sebelum mendapatkan kredit dan sesudah mendapatkan kredit bank selalu memberikan control berupa pengawasan.

Keberlanjutan Program Kredit Usaha Rakyat

Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat ini dinilai layak dipertahankan dan perlu untuk tetap dilanjutkan karena program Kredit Usaha Rakyat dianggap sudah memihak kepada masyarakat/Debitur, khususnya Debitur penerima KUR meskipun dalam pelaksanaannya masih ada penerima KUR yang memakai dana KUR ini dengan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dari adanya program Kredit Usaha Rakyat ini. Maka keberadaan program Kredit Usaha Rakyat juga masih sangat dibutuhkan khususnya oleh Debitur di Desa Sumber Lesung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi dampak program pemberdayaan melalui penyaluran KUR di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan. Penyaluran KUR di Desa Sumber Lesung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber lesung bahwa kecendrungan debitur KUR yang

banyak diminati adalah Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat ini persyaratannya relatif mudah prosesnya cepat, dan pencairan dana KUR hanya memerlukan waktu selama dua hari, sehingga diharapkan para UMKM tertarik dengan adanya kredit ini. Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut terbukti dengan semakin bertambahnya kesadaran nasabah untuk mengembangkan usahanya. Dampak positif adanya KUR dengan bertambahnya bidang usahanya secara otomatis pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak orang lain membuka lapangan pekerjaan dan membantu mengerjakannya. Penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan itu menghasilkan dampak negatif, yang semula untuk produksi, kenyataannya dalam perjalanan dipakai untuk konsumsi bukan untuk investasi yang dapat memberikan keuntungan untuk usahanya, berarti tidak sesuai dengan tujuan program KUR. UMKM tersebut menunjukkan adanya volume penjualan meningkat secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat efektif. Keberlanjutan Program Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung sebagian besar dari debitur ini mengatakan bahwa program KUR ini dinilai layak dipertahankan dan perlu untuk tetap dilanjutkan karena program KUR dianggap sudah memihak kepada masyarakat atau debitur KUR, meskipun dalam prosesnya masih ada penerima KUR yang memakai dana KUR ini dengan tidak

tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dari adanya program KUR ini.

SARAN

Perlu dilakukan evaluasi atau kunjungan yang berkelanjutan secara periodik untuk memperkecil atau bahkan meniadakan penyimpangan dalam penyaluran KUR. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap program KUR ini, jadi tidak hanya beban pengawasannya pada Bank pelaksana saja, dikarenakan minimnya waktu yang dimiliki oleh mantri kredit. Sehingga lebih dapat selektif dan tepat sasaran dalam memilih debitur KUR. Adanya pengarahan yang digunakan untuk memotivasi UMKM untuk lebih maju dan meningkatkan usahanya agar tidak tertindas oleh pasar modern yang telah menjamur di pelosok-pelosok desa. Sehingga dapat memotivasi untuk menjadikan UMKM yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespetif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Simanjuntak, Payaman J 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodinigrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suhartono, edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. *Program Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta Pusat: sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup).
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Perssindo.

Undang-undang

- Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.